

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husain. (2004). *Ekonomi Islam*. Magistra Insania Press.
- Alfianto, Ferbiansyah Yona, A. M. F. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Ejournal.Unesa.Ac.Id*, 1–16.
- Arifin Noor. (1997). *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*. CV Pustaka Setia.
- Atmaja, S., Badan, K., Daerah, P., & Tangerang, K. (2019). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Dampak the Role of the Local Government in the Implementation of the Impact of New City Development and Social Changing in Tangerang Regency , Banten Province*. 9(2), 123–133.
- Batlajery, S. (2016). Penerapan fungsi-fungsi manajemen pada aparaturn pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke. *ilmu ekonomi & sosial, Vol 7, No*, 135–155.
- Chornelia Wulandary, R. M., & Rohman, Abd. (2018). Peranan Pemerintah Kota Batu Dan Pemerintah Desa Punten Dalam Pemberdayaan Wisata Petik Apel. *Reformasi*, 8(2), 178. <https://doi.org/10.33366/rfr.v8i2.1150>
- Darwis, A. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fachri Yasin. (2002). *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*. Unri Press.
- Firmansyah, H., Nailah, D. L., & Hanany, H. (t.t.). PARTISIPASI PUSTAKAWAN DALAM MENCERDASKAN MASYARAKAT. Dalam *Jurnal Pustakawan Indonesia* (Vol. 13, Nomor 2).
- Habibi, M. M. (2022). Sinergi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 429–437.
- Halim. (2001). Efektivitas dan kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di propinsi bali tahun 2002–2006. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 4–5.

- Ismail Nawawi. (2009). *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*. Putra Media Nusantara.
- Jamal, S. (2012). Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian. *ilmiah Dakwah dan Komunikasi*, 3 No. 5, 148–150.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2005). Balai Pustaka.
- Kustanto, A. (2019). Pariwisata : Sebagai Salah Satu Upaya Memperoleh Devisa Bagi Pemerintah Indonesia. *Qistie*, 12(1), 13–21. <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i1.2756>
- Larasati, Dewi Citra & Kurahman, Y. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Wisata Hutan Pinus Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli. *Reformasi*, 9(2), 161–167.
- Lincoln YS, & Guba EG. (1990). Judging the quality of case study reports. *Internation Journal of Qualitative Studies in Education*, 53–59.
- Lukman, R., & Muktie, A. M. (2015). KAJIAN PENGARUH KEBERADAAN KAWASAN WISATA SANGIRAN TERHADAP ASPEK FISIK , ASPEK PENDAHULUAN Asas Pariwisata merupakan sebuah potensi yang layak untuk dikembangkan di Indonesia . Wilayah di Indonesia memiliki beragam potensi wisata yang unik , menarik , da. *Jurnal Teknik PWK*, 4(2), 282–292.
- Maharani, F. G., Malau, H., Ilmu, D., Negara, A., Ilmu, F., Universitas, S., & Padang, N. (2022). *PERAN DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KOTA PARIAMAN*. 1(11), 2475–2482.
- Nasution. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif . *Jurnal Gantang*, 83–85.
- Nurcholis, H. (t.t.). *PEMERINTAHAN DESA: “UNIT PEMERINTAHAN PALSU” DALAM SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor) **.
- Oka A. Yoeti. (2016). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Balai Pustaka.

- Prabowo, A. F. (2020). *Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Dalam Pengelolaan Obyekwisata mangrove Sari Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad). 1*, 1–133.
- PRIHATINI, M. T. (2021). Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Kalicupak Kidul Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Diss. Universitas Jenderal Soedirman*.
- Putri, D. A. (2021). Peranan Pengembangan Wisata Hutan Mangrove Margomulyo Di Dinas Pemuda , Kota Balikpapan. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2021, 9 (2): 171-18, 9(2), 171–184.
- rachman 21. (t.t.).
- Rahel Yuliana Yawan. (2014). Pengembangan Taman Wisata Mangrove di Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Provinsi Papua Barat. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Raihanah Daulay. (2021). THE INFLUENCE OF ISLAMIC ORGANIZATIONAL CULTURE, WORK ABILITY AND EMOTIONAL INTELLIGENCE ON EMPLOYEE PERFORMANCE IN ISLAMIC EDUCATION INSTITUTIONS. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 2, 3–4.
- Rianto Adi. (2021). Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Sanjaya, S., & Wijaya, R. A. (2020). Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatra Barat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 559–568. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26553>
- Soetomo. (2014). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 135–139.
- Sugiyono. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*.

Tina, Parawangi, A., & Malik, I. (2021). Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pulau Camba Cambang Kabupaten Pangkep. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(2), 504–519.

Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3), 79–92.

Wahyuni, S., Sulardiono, B., & Hendrarto, B. (2015). Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut Surabaya. *Diponegoro journal of maquares*, 4(4), 66–70.

Zulkarnain. (2003). *Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*.

Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor. 41 *Tentang Kehutanan*. Jakarta

_____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 *Tentang Keuangan Daerah*. Jakarta

_____. 2004. Undang-Undang Nomor. 33 *Tentang Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta

_____. 2009. Undang-Undang Nomor. 10 *Tentang Pariwisata Indonesia*. Jakarta

_____. 2009. Undang-Undang Nomor. 28 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta

_____. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 21 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta

_____. 2014. Undang-Undang Nomor. 6 *Tentang Pendapatan Asli Desa*. Jakarta

_____ . 2014. Undang-Undang Nomor. 30 *Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta

_____ . 2018. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 *Tentang BUMDes*. Jakarta

_____ . 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 77 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta

